

PENGELOLAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI SISKEUDES (STUDI KASUS DI DESA SUKAJADI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS)

Hotimah

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : abbi.hotimah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengelolaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi pengelolaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi partisipan, dengan pendekatan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan Sistem Keuangan Desa berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, belum berjalan dengan baik. Hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan sistem keuangan desa antara lain penentuan delegasi yang dikirimkan tiap dusun tidak dapat menyampaikan hasil musrenbang, tidak adanya kode rekening atau kode bidang kegiatan pada Aplikasi Siskeudes, kurangnya pemahaman Kaur dan Kasi dalam tugas dan fungsi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pengelolaan sistem keuangan desa berbasis siskeudes, yaitu dalam penyusunan RKPDesa adalah lebih selektif dalam penentuan delegasi dusun, Pemerintah Desa harus berkomunikasi dengan pihak Admin Kabupaten, meningkatkan kemampuan koordinasi Pelaksana Kegiatan.

Kata kunci : *Pengelolaan, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa merupakan kesatuan terkecil dari masyarakat yang memiliki hak otonomi

asli berdasarkan hokum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset.

Keberhasilan otonomi desa tidak terlepas dari faktor tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar itu adalah tata kelola

pemerintahan yang mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik disebut juga sebagai Good Corporate Governance. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Ubaedillah, 2018 mengatakan bahwa prinsip-prinsip GCG ada sembilan yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Alokasi dana yang besar ini secara tidak langsung memaksa Pemerintah Desa untuk berintegrasi, meningkatkan kualitas SDM perangkat desa, mengevaluasi kembali akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangannya. Selain pertanggungjawaban kepada Pemerintah, pertanggungjawaban kepada masyarakat juga sangat penting. Karena dana yang diberikan Pemerintah memiliki sumber utama yakni masyarakat itu sendiri.

Kementerian Dalam Negeri dan BPKP berusaha menjawab keresahan beberapa pihak terutama aparatur desa mengenai dampak dari “banjir dana” ini. Diciptakanlah sebuah aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bertujuan untuk memudahkan desa dalam mengelola keuangan desanya. Selain untuk menata kelola keuangan desa secara optimal, Siskeudes juga sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang.

Adanya Siskeudes ini merupakan usaha dan komitmen besar untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Namun demikian, dalam kenyataannya di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, pengelolaan siskeudes belum berjalan dengan optimal. Hal itu terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kelengkapan system dalam siskeudes belum maksimal, contohnya terdapat beberapa partisi system yang belum lengkap dimana partisi dalam bidang kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam system tidak ada sedangkan dalam peraturan pengelolaan keuangan harus ada.
2. Aplikasi Siskeudes yang dipergunakan sekarang masih mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan aplikasi siskeudes dituntut sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, akan tetapi sampai saat ini aplikasi siskeudes itu sendiri belum di update oleh pihak yang berwenang.
3. Operator pengelola sistem keuangan desa belum memahami secara maksimal tentang alur proses pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes,
4. Operator pengelola sistem keuangan desa belum memahami parameter bidang dan kegiatan

yang terdapat dalam aplikasi siskeudes, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penginputan kegiatan dan belanja desa.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pengelolaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan pengelolaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis?

KAJIAN PUSTAKA

Adapun dimensi yang menjadi ukuran dalam pengelolaan berkaitan dengan sebagaimana diungkapkan George R. Terry dalam Agus (2015 : 36) :

1. Perencanaan
Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Dalam perencanaan terlibat unsur

penentuan yang berarti bahwa dalam perencanaan tersebut tersirat pengambilan keputusan

2. Pengorganisasian
Untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang di miliki agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat di capai secara efektif dan efisien langkah pertama yang sangat penting dalam pengorganisasian ini yang umumnya harus di lakukan sesudah perencanaan adalah proses mendisain organisasi yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi dan tugas organisasi.
3. Menggerakkan
Suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas dari pada kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam pencapaian tujuan.
4. Pengendalian
Pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi sesungguhnya dengan standar terlebih dahulu di tetapkan.
Dimensi di atas adalah tolak ukur untuk mengukur pengelolaan dalam memberikan pelayanan sehingga dapat menghasilkan pencapaian tujuan yang optimal.

Siswanto (2005 : 21) mengemukakan bahwa “pengelolaan merupakan suatu aktifitas yang sistematis yang saling bersusulan agar tercapai tujuan”. Sedangkan, Terry (2012 : 3) mengungkapkan pengelolaan sebagai “suatu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain”.

Handoko (2003 : 6-7) mengemukakan bahwa ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu :

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, asosiasi perdagangan, masyarakat dan pemerintah daerah.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas

Pengertian sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3):

“Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.”

Definisi sistem menurut Mulyadi (2016:5), Sistem adalah “suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.

Keuangan Desa dalam UU Desa NO. 06 Tahun 2014 menjelaskan pengertian Keuangan Desa sebagai berikut : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Aplikasi Siskeudes ini menggunakan database Microsoft Access lebih sehingga portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer

hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Pada interface koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (Open Database Connectivity) atau Direct Access. Dengan koneksi via ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke Driver MsAccess akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem operasi windows. Sedangkan Direct Access pembacaan file langsung dilakukan pada file database yang bersangkutan. Penggunaan opsi koneksi ODBC mengharuskan sistem komputer terinstall Microsoft Jet OleDB 4.0 pada Microsoft Office 2000-2003. Sehingga untuk komputer yang tidak terinstall office 2003 tidak dapat menggunakan fitur ini. Apabila ingin tetap menggunakan fitur ini adalah dengan cara menambahkan aplikasi Office Access 2003 atau menambahkan access database engine.

Secara teknis penggunaan opsi via ODBC lebih disarankan dan lebih menjamin keamanan data dari kerusakan (*corrupt*) dan dapat digunakan pada mode multiuser dengan cara melakukan sharing folder database "DataAPBDes2017.mde". Penggunaan opsi Direct Access membuat aplikasi langsung digunakan apabila dalam komputer tidak tersedia Microsoft Jet melakukan pembacaan file pada database keuangan desa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif deskriptif. Lamanya penelitian ini adalah 10 bulan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi partisipan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Pendamping Desa. Teknik penelitian sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Studi Kasus di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten:

1. Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara setiap informan dan observasi yang dilakukan dilapangan, dengan berdasarkan kepada teori yang dikemukakan oleh Terry (Agus, 2015 : 36) mengenai dimensi yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Adapun

dimensi tersebut dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal itu dapat terlihat dari indikator-indikator yaitu adanya penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam bentuk RKPDesa melalui musyawarah desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang belum berjalan dengan baik.

Karena organisasi merupakan sebuah sistem, apabila sistem bekerjasama maka akan berjalan dengan baik. Tetapi jika salah satu sub sistem dari sistem tersebut tidak berjalan dengan maka sistem tersebut akan berjalan pincang atau dikatakan sistem itu tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan Romney dan Steinbart (2015:3), yaitu “Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari sub sistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.”

2. Pengorganisasian

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal itu dapat terlihat dari indikator-indikator pada dimensi pengorganisasian yaitu pelaksana kegiatan mampu berkoordinasi dengan kepala desa dalam bentuk pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilaksanakan, serta seluruh kaur dan kasi mampu memahami tugas, pokok dan fungsi yang dibebankan kepada mereka.

Sebagaimana yang diungkapkan Kadarman dan Udaya (2001:82), bahwa “Pengorganisasian adalah penetapan struktur melalui peran-peran dengan penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi”.

Dengan demikian jika Pemerintah Desa ingin mencapai suatu tujuan pada organisasi maka pegawai harus memiliki kemampuan dalam memahami tugas pokok dan fungsi sesuai dengan pekerjaannya.

3. Penggerakan

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi penggerakan dengan indikator-indikator yaitu adanya pengarahan dari kepala desa kepada seluruh aparatur

pemerintah desa yang ada agar dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan adanya pengarahan dari Sekretaris Desa selaku koordinator dan verifikator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Sebagaimana yang diungkapkan Stoner dan Robin (Manullang, 2004 : 10), bahwa :

“Kepemimpinan adalah suatu proses memerintah dan mempengaruhi agar kegiatan atau pekerjaan yang saling terkait it dapat diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi antara lain yang dapat dilakukan pemimpin adalah memotivasi bawahan, memerintah mereka, menyeleksi saluran komunikasi yang efektif dan memecahkan konflik atau masalah yang timbul baik dari internal maupun eksternal”.

Dengan demikian jika Pemerintah Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis dalam memberikan pengarahan kepada pegawai harus membawa pengaruh besar agar pengelolaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes dapat berjalan baik.

4. Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa yang meliputi indikator-indikator, yaitu adanya pengawasan pengelolaan keuangan desa dari Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan efektif, serta adanya pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dari BPKP.

Sebagaimana yang diungkapkan Terry dan Rue (Gultom, 2014 : 6), “Pengawasan adalah mengevaluasi pelaksanaan kerja dan jika perlu memperbaiki yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil yang sesuai dengan rencana. Manajemen dibutuhkan oleh organisasi karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit”.

Dengan demikian Pemerintah Desa Sukajadi perlu menerapkan pengawasan yang efektif atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan, kemudian menilainya dan bila perlu mengoreksinya agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari belum sesuaiya pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan apa yang

disampaikan oleh Terry (Agus, 2015 : 36) meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian.

2. Hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan-hambatan dalam pengelolaan sistem keuangan desa berbasis Aplikasi SISKEUDES adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman tim penyusun dalam hal tahapan perencanaan pembangunan, serta tidak tersampainya hasil musyawarah desa oleh delegasi tiap dusun kepada masyarakat.
- 2) Tidak adanya kode rekening atau kode bidang kegiatan pada SISKEUDES yang membingungkan Pemerintah Desa sehingga mempengaruhi pada pencapaian proses penyusunan RKPDesa.
- 3) Masih kurangnya pemahaman tugas, pokok dan fungsi kaur dan kasi sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kaur dan kasi sebagai pelaksana kegiatan.
- 4) Pemberian arahan oleh Kepala Desa kepada seluruh aparatur

pemerintah desa belum efektif, dikarenakan dalam penyampaian yang diberikanya sulit dipahami seluruh aparatur pemerintah desa sehingga kepala desa tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap pekerjaan.

- 5) Masih kurangnya kemampuan berkomunikasi Sekretaris Desa dengan perangkat desa yang lainnya, dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator dan verifikator pengelolaan keuangan desa.
- 6) Masih terdapat kekurangan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa seperti bukti pendukung berupa laporan penyetoran pajak tidak dilampirkan.

Dengan demikian hambatan-hambatan diatas, tidak jauh berbeda dengan beberapa hasil penelitian ahli bahwa hambatan-hambatan dalam aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) antara lain : tidak adanya pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan yang menggunakan PSAK No. 45, sumber daya manusia yang kurang mendukung, aplikasi siskeudes belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja kepala desa selaku penyelenggara pemerintahan di desa, masih rendahnya tingkat pengawasan dan partisipasi dari masyarakat, dan adanya perubahan anggaran pada pelaporan pertanggungjawaban. (Purnama: 2017, Abdullah: 2019, Mercya & Adnan: 2019)

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Hambatan dalam Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya-upaya dalam pengelolaan sistem keuangan desa berbasis Aplikasi SISKEUDES adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah desa lebih selektif dalam menentukan tim penyusun serta peserta musdes agar hasil keputusan musdes tersampaikan dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
- 2) Pemerintah Desa melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten kaitan dengan bidang dan kegiatan yang tidak terdapat pada Aplikasi SISKEUDES.
- 3) Aparatur pemerintah desa berupaya lebih cepat dalam membuat laporan pertanggungjawaban, serta melakukan koordinasi antara semua aparatur pemerintah desa.
- 4) Kepala Desa berupaya memberikan arahan kepada Aparatur Pemerintah Desa dengan lebih personal serta memberikan reward atau penghargaan kepada kaur dan kasi yang melaksanakan tugasnya dengan baik.
- 5) Sekretaris Desa berupaya meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi serta mempelajari

berbagai bentuk informasi baik dari buku, peraturan perundang-undangan serta melakukan sharing dengan sekretaris desa yang lain.

- 6) Pemerintah Desa melakukan inventarisasi kembali seluruh bukti pendukung pada setiap laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat.

Dengan demikian, pada dasarnya Pemerintah Desa Sukajadi telah berupaya untuk mengatasi hambata-hambatan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes, termasuk memberikan arahan kepada aparatur pemerintah desa untuk menerapkan langkah-langkah penggunaan aplikasi siskeudes sebagaimana yang diungkapkan Basori dan Megantoro (2016:9), yaitu:

- 1) Log in ke sistem menggunakan user ID dan Password yang dimiliki Desa.
- 2) Setelah berhasil masuk ke sistem, lalu untuk memasukkan data pilih Entri, kemudian pilih menu yang tertera.
- 3) Menu Perencanaan. Perencanaan siskeudes digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari Restra Desa, RPJMDesa, dan RKPDesa.
- 4) Menu Penganggaran. Penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi SISKEUDES di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi SISKEUDES di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik jika dikaitkan dengan teori Terry (Agus, 2015 : 36) yang memberikan penjelasan bahwa pengelolaan dalam suatu organisasi terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, Pergerakan, dan Pengendalian. Dapat dilihat bahwa masih terdapat kelemahan dalam beberapa indikator antara lain yaitu dalam indikator penyusunan perencanaan pembangunan desa dan perencanaan bidang dan kegiatan. Adapun permasalahan lain yaitu masih kurangnya kemampuan kaur dan kasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban serta kurangnya pemahaman kaur dan kasi dalam tugas dan fungsi yang dibebankan. Selanjutnya permasalahan yang juga dialami pemerintah Desa Sukajadi dalam pengelolaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi SISKEUDES yaitu kurangnya kemampuan

Sekretaris Desa dalam memberikan pengarahan selaku koordinator dan verifikator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis terkait Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi SISKEUDES, adalah kurangnya pemahaman tim penyusun dalam hal tahapan perencanaan pembangunan serta tidak tersampainya hasil musyawarah desa, tidak adanya kode rekening atau kode bidang kegiatan pada SISKEUDES, masih kurangnya pemahaman tugas, pokok dan fungsi kaur dan kasi, pemberian arahan oleh Kepala Desa kepada seluruh aparatur pemerintah desa belum berjalan dengan efektif, masih kurangnya kemampuan berkomunikasi Sekretaris Desa, masih terdapat kekurangan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis dalam mengatasi hambatan-hambatan terkait pengelolaan Sistem Keuangan Desa berbasis Aplikasi SISKEUDES, adalah pemerintah desa lebih selektif dalam

menentukan tim penyusun serta peserta musdes, Pemerintah Desa melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten kaitan dengan bidang dan kegiatan yang tidak terdapat pada Aplikasi SISKEUDES. Kemudian aparatur pemerintah desa berupaya lebih cepat dalam membuat laporan pertanggungjawaban, Kepala Desa berupaya memberikan arahan kepada Aparatur Pemerintah Desa dengan melakukan pendekatan lebih personal serta memberikan reward atau penghargaan kepada kaur dan kasi yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekretaris Desa berupaya meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, selanjutnya Pemerintah Desa berupaya melakukan inventarisasi kembali seluruh bukti pendukung pada setiap laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Bejo, Siswanto. (2005). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Priansa, Donni. (2013). *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung. Alfabeta.

Romney, Marshall B. dan Steinbart, (2015), *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 13*, alihbahasa : Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari, Salemba Empat, Jakarta.

Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung. Alfabeta

Terry, George R. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen*, penerjemah J-Smith D.F.M. Jakarta: PT Bumi Aksara

Dokumen Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Buku Kerja – Aplikasi Sistem Keuangan Desa (2016) : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).